

Dekonstruksi Bias Pribumi-Sentris: Studi Representasi Etnis Tionghoa Dalam Buku Teks Sejarah Indonesia Kurikulum Merdeka

Deconstructing Indigenist Bias: A Study of the Representation of Ethnic Chinese in Indonesian History Textbooks under the Kurikulum Merdeka

I Gusti Ayu Amelia Purnama Sari^a, Ni Putu Yuniarika Parwati^b, Ni Komang Sri Yoga Donia Widiantri^c, Maria Elaviana Arni^d

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
Jl. Seroja, Tonja No. 56 Denpasar, Bali, Indonesia
Pos-el: igustiayuamelia.ps01@gmail.com; parwatiyuniarika@gmail.com;
doniawidiantri2@gmail.com; aviarni045@gmail.com;

Abstrak. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana etnis Tionghoa direpresentasikan dalam buku teks sejarah Indonesia yang dirancang dalam kerangka Kurikulum Merdeka. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dan kerangka teori poskolonial, penelitian ini berusaha membongkar struktur narasi yang cenderung menempatkan komunitas Tionghoa di posisi marginal, sementara kelompok pribumi dijadikan subjek tunggal dari sejarah nasional. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka mengusung semangat kebhinekaan dan inklusivitas, representasi etnis Tionghoa dalam materi ajar sejarah masih menyisakan ketimpangan yang signifikan: kontribusi mereka kerap direduksi menjadi narasi ekonomi semata, partisipasi mereka dalam perjuangan kemerdekaan nyaris tidak tampak, dan identitas mereka lebih sering dikonstruksi melalui lensa kecurigaan historis ketimbang pengakuan kewarganegaraan yang setara. Penelitian ini berpendapat bahwa bias pribumi-sentris bukan sekadar kelalaian editorial, melainkan cerminan dari ideologi kenegaraan yang belum sepenuhnya berdamai dengan pluralitas sejarahnya sendiri. Implikasi dari temuan ini mencakup perlunya reformasi konten buku teks yang lebih radikal, pelibatan komunitas Tionghoa dalam proses penyusunan kurikulum, serta pengadopsian paradigma sejarah multikultural yang melampaui batas-batas etnosentrisme. Artikel ini diharapkan berkontribusi pada perdebatan yang lebih luas tentang keadilan epistemik dalam pendidikan sejarah di Indonesia.

Kata Kunci: Representasi Tionghoa, Buku Teks Sejarah, Kurikulum Merdeka, Bias Pribumi-Sentris, Pendidikan Multikultura

Abstract. This article critically examines how the Chinese-Indonesian ethnic group is represented in Indonesian history textbooks designed within the Merdeka Curriculum framework. Using critical discourse analysis and postcolonial theoretical frameworks, this study attempts to deconstruct narrative structures that tend to position the Chinese community marginally, while indigenous groups are established as the sole subjects of national history. The study's findings indicate that despite the Merdeka Curriculum's emphasis on diversity and inclusivity, the representation of Chinese-Indonesians in history teaching materials still contains significant imbalances: their contributions are often reduced to economic narratives, their participation in the independence struggle is barely visible, and their identity is more frequently constructed through a lens of historical suspicion rather than recognition of equal citizenship. This research argues that indigenous-centric bias is not merely editorial negligence, but a reflection of state ideology that has not fully reconciled with its own historical plurality. Implications of these findings include the need for more radical textbook content reform, the involvement of Chinese-Indonesian communities in curriculum development processes, and the

adoption of a multicultural historical paradigm that transcends ethnocentrism.

Keywords: *Chinese-Indonesian Representation, History Textbooks, Merdeka Curriculum, Indigenous-Centric Bias, Multicultural Education*

PENDAHULUAN

Buku teks pelajaran bukan sekadar kumpulan fakta yang disusun secara kronologis. Ia adalah artefak ideologis-medium di mana negara, secara sadar maupun tidak, merumuskan versi resmi tentang siapa yang dianggap bagian dari "kita" dan siapa yang berada di luar batas imajinasi kebangsaan itu. Dalam konteks Indonesia yang plural, pertanyaan tentang siapa yang diwakili, bagaimana diwakili, dan mengapa beberapa kelompok hampir tidak tampak dalam narasi sejarah nasional menjadi sangat mendesak untuk dijawab.

Etnis Tionghoa merupakan salah satu komunitas yang paling kompleks posisinya dalam lanskap sosial-historis Indonesia. Mereka telah hadir di kepulauan Nusantara sejak berabad-abad silam, memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan maritim, interaksi budaya, bahkan dalam beberapa episode perjuangan melawan kolonialisme. Namun demikian, representasi mereka dalam buku teks sejarah sekolah sering kali tidak mencerminkan kompleksitas dan kedalaman kontribusi itu. Komunitas Tionghoa cenderung muncul sebagai figuran-kalau pun hadir dalam cerita besar tentang bangsa Indonesia, bukan sebagai aktor yang turut membentuknya (Rustam, 2021).

Kebijakan Kurikulum Merdeka yang diluncurkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak tahun 2022 membawa janji pembaruan yang cukup substansial. Kurikulum ini mengklaim orientasi yang lebih humanis, inklusif, dan berbasis pada pengakuan terhadap keragaman Indonesia (Kemendikbudristek, 2022). Profil Pelajar Pancasila yang menjadi fondasi

filosofis kurikulum ini secara eksplisit menyebut nilai kebhinekaan global dan semangat bergotong royong lintas identitas sebagai kompetensi yang harus dicapai peserta didik.

Pertanyaannya kemudian: apakah semangat tersebut benar-benar tercermin dalam konten buku teks sejarah yang digunakan di ruang-ruang kelas? Pertanyaan ini bukan tanpa urgensi.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa buku teks sejarah di berbagai negara memiliki kecenderungan untuk memperkuat narasi mayoritas sambil memarginalkan kelompok-kelompok minoritas (Apple, 2019; Loewen, 2020). Di Indonesia, warisan Orde Baru yang selama puluhan tahun menggunakan buku teks sebagai instrumen pembentukan identitas nasional yang homogen meninggalkan jejak yang tidak mudah dihapus (Heryanto, 2021). Diskriminasi struktural terhadap etnis Tionghoa yang dipraktikkan secara sistematis selama era Soeharto—mulai dari larangan penggunaan bahasa Mandarin di ruang publik, penutupan sekolah Tionghoa, hingga pembatasan hak budaya—ikut membentuk cara pandang tentang komunitas ini yang tertanam dalam materi pendidikan (Suryadinata, 2020).

Era Reformasi memang membuka ruang yang jauh lebih lebar bagi komunitas Tionghoa untuk mengekspresikan identitas budayanya. Imlek menjadi hari libur nasional, Konghucu diakui sebagai agama resmi, dan berbagai ekspresi budaya Tionghoa kembali menghiasi ruang publik. Namun, transformasi kultural yang terjadi di permukaan masyarakat belum tentu paralel dengan perubahan dalam cara negara menulis dan mengajarkan sejarah.

Inilah yang menjadi titik blind spot yang perlu dikritisi (Purdey, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) yang dikembangkan berdasarkan kerangka Fairclough (2003). CDA dipilih karena kemampuannya untuk mengungkap dimensi ideologis dan relasi kuasa yang tersembunyi dalam teks-teks institusional. Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya membaca apa yang secara eksplisit dinyatakan dalam buku teks, tetapi juga membongkar apa yang diandaikan, apa yang dihilangkan, dan bagaimana pilihan-pilihan linguistik tertentu berkontribusi pada pembentukan wacana tertentu tentang etnis Tionghoa.

Selain CDA, penelitian ini juga menerapkan analisis konten (*content analysis*) secara sistematis untuk mengidentifikasi frekuensi, konteks, dan cara penyebutan etnis Tionghoa dalam buku-buku teks yang dikaji. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan analisis yang sekaligus menjangkau dimensi kuantitatif (seberapa sering dan dalam konteks apa) maupun dimensi kualitatif (bagaimana dan dengan efek wacana apa representasi itu dibentuk).

Sumber data utama penelitian ini adalah buku teks sejarah yang diterbitkan dan/atau disetujui oleh Kemendikbudristek dalam kerangka Kurikulum Merdeka untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X, XI, dan XII. Buku-buku tersebut mencakup buku teks yang diterbitkan oleh Penerbit Kemendikbud sendiri (Buku Sekolah Elektronik/BSE) maupun buku teks dari penerbit swasta yang telah mendapatkan pengesahan resmi. Fokus pada jenjang SMA dipilih karena materi sejarah nasional yang paling komprehensif— termasuk yang paling mungkin memuat representasi etnis minoritas—

terdapat di jenjang ini.

Sumber data sekunder meliputi: dokumen kebijakan Kurikulum Merdeka, laporan penelitian tentang representasi etnis Tionghoa dalam konteks Indonesia, kajian komparatif tentang buku teks sejarah di kawasan Asia Tenggara, serta literatur akademik tentang teori representasi, pendidikan multikultural, dan keadilan epistemik.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang saling terkait. Tahap pertama adalah analisis teks (*textual analysis*), yakni pembacaan mendalam terhadap buku teks untuk mengidentifikasi semua passages yang menyebut atau berkaitan dengan etnis Tionghoa, termasuk yang bersifat implisit. Pada tahap ini, peneliti memperhatikan pilihan kosakata (*lexical choices*), struktur kalimat, penggunaan metafora, dan hubungan antar proposisi.

Tahap kedua adalah analisis praktik diskursif (*discursive practice analysis*), yang menelaah bagaimana teks-teks tersebut diproduksi dan dikonsumsi termasuk proses seleksi dan penyuntingan yang mungkin telah berlangsung dalam penyusunan buku teks, serta bagaimana guru dan siswa kemungkinan besar akan memaknai teks-teks itu dalam konteks pembelajaran.

Tahap ketiga adalah analisis praktik sosial (*social practice analysis*), yang menempatkan teks dan praktik diskursif dalam konteks sejarah dan sosial yang lebih luas termasuk warisan kebijakan diskriminatif Orde Baru, dinamika relasi etnis di Indonesia pasca-Reformasi, dan tekanan-tekanan ideologis yang mungkin mempengaruhi penyusunan kurikulum.

Untuk menjamin validitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber (membandingkan representasi dalam beberapa buku teks berbeda), triangulasi teori (menerapkan lebih dari satu kerangka teoritis), dan member-checking secara informal melalui

konsultasi dengan akademisi dari bidang studi sejarah, pendidikan, dan kajian Tionghoa-Indonesia. Posisi penulis sebagai peneliti yang memiliki kesadaran tentang potensi bias dalam kajian semacam ini juga dikemukakan secara terbuka sebagai bagian dari reflektivitas metodologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan paling mencolok dalam analisis buku teks sejarah Kurikulum Merdeka adalah ketimpangan yang sangat mendasar dalam *kuantitas* kehadiran etnis Tionghoa. Dari keseluruhan halaman yang mengulas sejarah Indonesia sejak masa pra-kolonial hingga era kontemporer, proporsi halaman yang secara substantif membahas kontribusi atau pengalaman etnis Tionghoa sangat minim—tidak lebih dari 3 hingga 5 persen dari total konten, bahkan dalam topik-topik di mana keterlibatan historis komunitas Tionghoa sangat signifikan, seperti perdagangan maritim Nusantara, peristiwa G30S, dan pembangunan ekonomi Orde Baru.

Lebih dari sekadar masalah kuantitas, yang lebih mengkhawatirkan adalah *kualitas* dan *konteks* kehadiran tersebut. Etnis Tionghoa dalam buku-buku teks yang dikaji umumnya muncul dalam salah satu dari empat pola representasi berikut.

Pertama, representasi sebagai agen ekonomi tunggal. Dalam bab-bab yang membahas perdagangan dan perkembangan ekonomi, etnis Tionghoa hampir selalu dihadirkan dalam kapasitas pedagang, tukang, atau pengusaha. Sementara fakta historis memang menunjukkan peran besar komunitas Tionghoa dalam sektor ekonomi, reduksi identitas mereka menjadi entitas ekonomi semata mengabaikan dimensi-dimensi lain dari kehadiran mereka: peran intelektual, kontribusi budaya, partisipasi dalam gerakan sosial, hingga keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan (Suryadinata, 2020). Framing semacam ini secara tidak langsung

melanggengkan stereotip "Cina dagang" yang sudah lama menjadi instrumen *otherization* dalam wacana populer Indonesia.

Peristiwa-peristiwa seperti Geger Pecinan 1740 di Batavia atau berbagai insiden kerusuhan anti-Tionghoa kerap dihadirkan dengan framing yang ambigu atau bahkan menyiratkan bahwa ketegangan tersebut lahir dari sikap komunitas Tionghoa sendiri—kesombongan ekonomi, eksklusivitas sosial, atau ketidakloyalan pada "tanah air" tanpa menelaah secara memadai faktor struktural di baliknya, yakni kebijakan kolonial Belanda yang secara sengaja memanfaatkan komunitas Tionghoa sebagai *buffer class* sekaligus sasaran amarah pribumi (Purdey, 2020). Penghilangan konteks kolonial ini bukan kecerobohan analitis yang biasa; ia adalah pilihan naratif yang konsekuensinya sangat serius.

Ini mungkin adalah bentuk bias yang paling mengejutkan. Tokoh-tokoh Tionghoa yang nyata-nyata berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti Yap Tjwan Bing, Liem Koen Hian, Siauw Giok Tjhan, hingga para anggota Tionghoa Peranakan yang aktif dalam berbagai organisasi pergerakan-hampir sepenuhnya absen dari narasi buku teks. Padahal, penelitian sejarah kontemporer telah mendokumentasikan partisipasi yang cukup kaya dari kelompok ini (Rustam, 2021). Absensi ini bukan hanya salah secara faktual; ia juga mengirimkan pesan yang kuat kepada siswa-siswa Tionghoa bahwa leluhur mereka tidak memiliki tempat dalam cerita heroik tentang kelahiran bangsa Indonesia.

Dalam beberapa buku teks, komunitas Tionghoa muncul dalam konteks kekerasan—terutama Kerusuhan Mei 1998—dan meskipun ini merupakan peristiwa yang penting untuk diakui, cara penggambarannya sering kali menempatkan komunitas Tionghoa semata sebagai objek yang menerima nasib, tanpa eksplorasi tentang bagaimana komunitas ini

bertahan, berjuang, dan berkontribusi pada proses reformasi yang mengikutinya (Heryanto, 2021). Representasi korban yang pasif ini, paradoksnya, tidak lebih manusiawi dari pengabaian—ia tetap menyangkal agensi subjek yang dikisahkan.

Bias yang ditemukan dalam buku teks bukan hanya soal "apa yang dimasukkan" dan "apa yang ditinggalkan," tetapi juga tentang bagaimana pilihan-pilihan linguistik dan naratif berkontribusi pada pembentukan relasi sosial tertentu antara pembaca dan kelompok yang dikisahkan.

Salah satu mekanisme yang paling konsisten adalah penggunaan pronomen orang ketiga jamak ketika merujuk pada etnis Tionghoa. Dalam banyak passages, narasi menggunakan frasa seperti "orang-orang Tionghoa," "para pedagang Cina," atau "kelompok Tionghoa" yang secara linguistik menciptakan jarak antara subjek yang bercerita (atau yang diasumsikan sebagai pembaca) dan kelompok yang diceritakan. Bandingkan dengan bagaimana tokoh-tokoh dari kelompok pribumi sering disebut dengan nama pribadi dan diintegrasikan dalam narasi sebagai "kita" atau "bangsa kita." Perbedaan penempatan gramatikal ini bukan detail kecil—ia membangun secara halus pemahaman tentang siapa yang *termasuk* dan siapa yang *di luar* komunitas nasional yang dibayangkan (Fairclough, 2003).

Mekanisme kedua adalah *chronotope* yang asimetris—cara narasi mengorganisir kelompok yang berbeda dalam hubungannya dengan waktu dan ruang historis. Kelompok pribumi dikisahkan dengan kedalaman temporal yang kaya: ada nenek moyang yang disebut namanya, ada genealogi perjuangan, ada mata rantai dari masa pra-sejarah hingga kemerdekaan dan seterusnya. Etnis Tionghoa, di sisi lain, sering muncul secara episodik—hadir dalam satu momen, lalu menghilang tanpa kelanjutan—seolah tidak memiliki kontinuitas yang bermakna dalam lanskap

sejarah Indonesia. Ketidadaan kronotop yang utuh ini secara implisit menyiratkan bahwa komunitas Tionghoa adalah "tamu" dalam sejarah, bukan "tuan rumah" bersama (Banks, 2022).

Ketiga, ada apa yang bisa disebut sebagai selective *foregrounding*—cara teks memilih aspek-aspek tertentu dari pengalaman etnis Tionghoa untuk ditonjolkan sementara aspek lain dibiarkan di latar belakang. Ketika kekayaan pedagang Tionghoa dikedepankan tanpa konteks tentang diskriminasi struktural yang mereka hadapi, atau ketika partisipasi militer Tionghoa dalam konflik Perang Kemerdekaan diabaikan, yang tercipta adalah gambaran yang tidak hanya tidak lengkap tetapi secara aktif menyesatkan. Selective foregrounding bekerja untuk mengonfirmasi stereotip yang sudah ada daripada menantangnya (Apple, 2019).

Analisis kritis terhadap buku teks tidak boleh berhenti pada teks verbal semata. Elemen visual ilustrasi, foto, peta, dan infografis juga merupakan pembawa makna yang sangat kuat, sering kali lebih langsung mempengaruhi imajinasi pembaca muda daripada paragraf-paragraf yang panjang.

Dalam buku teks sejarah yang dikaji, representasi visual etnis Tionghoa juga menampilkan pola yang patut dikritisi. Ketika gambar atau ilustrasi yang menampilkan etnis Tionghoa hadir, mereka hampir selalu dalam konteks yang secara visual "mengotherkan" mereka: gambar kampung pecinan yang eksotis dan terpisah dari pemukiman umum, ilustrasi pedagang berpakaian tradisional Cina yang tampak "asing" dari lingkungannya, atau foto-foto dokumen sejarah yang menunjukkan segregasi fisik komunitas Tionghoa di kota-kota kolonial.

Tidak ada gambar yang menampilkan seorang anak Tionghoa bermain bersama teman-teman pribuminya, tidak ada ilustrasi tentang pernikahan campuran yang menjadi fakta demografis yang sangat umum dalam

sejarah Indonesia, dan tidak ada foto tokoh Tionghoa yang berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh nasional lain dalam konteks perjuangan atau pembangunan. Ketiadaan gambar-gambar semacam ini—yang secara visual akan mengkomunikasikan integrasi dan kebersamaan—adalah bentuk bias visual yang melengkapi bias verbal yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam kerangka teori representasi Hall (1997), gambar bekerja melalui dua level makna: denotatif (apa yang secara harfiah ditampilkan) dan konotatif (makna kultural yang diasosiasikan dengan apa yang ditampilkan). Ketika seorang siswa berulang kali melihat gambar-gambar yang secara denotatif menampilkan etnis Tionghoa dalam konteks keterpisahan dan keasingan, asosiasi konotatif yang terbentuk—bahwa mereka "berbeda," "asing," "tidak sepenuhnya bagian dari kita"—menjadi tertanam dalam cara siswa tersebut memandang tetangga, teman, atau kolega Tionghoa mereka di kehidupan nyata.

Memahami mengapa bias ini bertahan bahkan dalam Kurikulum Merdeka yang secara retorika berkomitmen pada inklusivitas memerlukan pemahaman tentang struktur ideologis yang menopangnya. Setidaknya ada tiga faktor yang saling berinteraksi.

Selama lebih dari tiga dekade, negara secara aktif mengonstruksi warga negara ideal Indonesia sebagai sosok yang secara kultural "asli" berbahasa Indonesia, beragama Islam, dan berlatar etnis Melayu-Nusantara (Heryanto, 2021). Wacana ini telah merasuk ke dalam cara penulisan sejarah yang dinormalisasi sedemikian rupa sehingga bias pribumi-sentris tidak lagi tampak sebagai bias—ia terasa seperti "narasi yang wajar." Para penulis buku teks, sebagian besar lahir dan dididik dalam sistem yang sama, membawa asumsi-asumsi ini tanpa selalu menyadarinya secara kritis.

Meski era Reformasi membawa liberalisasi politik yang signifikan, sentimen

nasionalisme etnis yang eksklusif tidak menghilang bahkan di beberapa konteks menguat kembali (Purdey, 2020). Penyusunan buku teks adalah proses yang tidak berlangsung dalam vakum politik; ia dipengaruhi oleh tekanan dari berbagai kelompok kepentingan. Dalam iklim di mana "keistimewaan pribumi" masih menjadi argumen yang memiliki traksi politik, penulis dan editor buku teks mungkin mengambil pilihan yang "aman" secara politis—menghindari konten yang berpotensi memancing kontroversi seputar isu etnis.

Sejauh yang dapat diidentifikasi dari dokumen-dokumen publik, proses penyusunan Kurikulum Merdeka dan buku teks yang menyertainya tidak secara sistematis melibatkan perwakilan dari komunitas Tionghoa-Indonesia. Ketika suatu kelompok tidak memiliki kursi di meja tempat cerita tentang mereka ditulis, hasilnya hampir dapat dipastikan: representasi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau sarat stereotip (Fricker, 2007). Ini bukan masalah niat baik atau buruk dari para penyusun; ini adalah masalah struktural tentang siapa yang dianggap otoritas dalam menentukan konten pengetahuan resmi.

Geger Pecinan 1740—pembantaian massal terhadap komunitas Tionghoa di Batavia oleh pasukan VOC yang diikuti oleh sebagian kalangan pribumi—adalah salah satu peristiwa paling tragis sekaligus paling kompleks dalam sejarah kolonial Indonesia. Peristiwa ini layak dijadikan studi kasus karena cara ia direpresentasikan (atau tidak direpresentasikan) dalam buku teks mencerminkan dengan sangat jelas mekanisme-mekanisme bias yang sedang kita bahas.

Dalam buku teks yang dikaji, Geger Pecinan umumnya disinggung secara sangat ringkas—satu atau dua paragraf—dalam konteks pembahasan tentang perlawanan terhadap VOC. Framing yang digunakan cenderung menonjolkan dimensi "perlawanan

pribumi" terhadap VOC sambil menenggelamkan fakta bahwa korban langsung dari peristiwa ini adalah ribuan orang Tionghoa. Korban-korban tersebut tidak disebutkan dengan rincian yang manusiawi; mereka hadir sebagai angka statistik yang cepat berlalu, tanpa nama, tanpa wajah, tanpa narasi tentang siapa mereka sebelum tragedi itu terjadi.

Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa buku teks menghadirkan narasi yang secara implisit "memaklumi" keterlibatan pribumi dalam kekerasan tersebut dengan menempatkannya dalam konteks kemarahan terhadap VOC—seolah kebencian terhadap VOC secara natural mentransfer ke arah komunitas Tionghoa yang dijadikan sasaran kebencian itu. Analisis wacana kritis terhadap framing semacam ini mengungkapkan ketidakhadiran pertanyaan moral yang semestinya diajukan: mengapa kemarahan yang sah terhadap penjajah berbelok menjadi kekerasan terhadap sesama yang tertindas? dan apa yang kisah ini ajarkan kepada kita tentang mekanisme politik kebencian yang bisa dimanipulasi?

Ketiadaan refleksi moral semacam ini bukan hanya masalah pedagogi yang buruk—ia juga berpotensi menormalisasi logika serupa dalam konteks kontemporer. Zulkifli & Hamid (2022) dalam kajian mereka tentang politik memori dan kurikulum sejarah Indonesia berargumen bahwa cara negara memilih untuk "mengingat" atau "melupakan" kekerasan terhadap minoritas dalam buku teks mencerminkan sikap implisit terhadap akuntabilitas historis dan ketika kekerasan tersebut dinormalisasi atau ditempatkan dalam konteks yang mengaburkan pertanggungjawabannya, pesan yang dikirimkan kepada generasi muda sangatlah problematik.

Satu aspek yang kerap luput dari perhatian dalam diskusi tentang representasi etnis Tionghoa adalah ambiguitas konseptual

yang mendasari kebijakan negara terhadap komunitas ini: apakah yang diharapkan adalah *integrasi* (proses di mana komunitas yang berbeda hidup bersama sambil mempertahankan identitas kultural masing-masing) atau *asimilasi* (proses di mana identitas minoritas diserap ke dalam identitas dominan)?

Dokumen resmi Kurikulum Merdeka menggunakan bahasa yang secara permukaan tampak mendukung integrasi: "kebhinekaan global," "menghargai keragaman," "identitas yang beragam." Namun, analisis terhadap konten buku teks menunjukkan bahwa yang dipraktikkan masih lebih dekat ke logika asimilasi: keberhasilan komunitas Tionghoa dalam narasi sejarah diukur dari seberapa jauh mereka telah "melebur" ke dalam masyarakat Indonesia yang lebih luas, sementara ekspresi identitas kultural Tionghoa yang dipertahankan sering kali dikisahkan dengan konotasi negatif—sebagai tanda "keeksklusifan" atau "ketidakloyalan."

Logika asimilasionis ini, sebagaimana dikritisi oleh Banks (2022), adalah bentuk kekerasan simbolik yang halus. Ia mensyaratkan bahwa untuk diterima sebagai bagian dari "kita," seseorang dari kelompok minoritas harus bersedia melepaskan sebagian identitasnya. Ini bukan inklusivitas sejati; ini adalah inklusivitas bersyarat yang tetap menempatkan identitas mayoritas sebagai standar normatif yang harus dicapai.

Implikasi pedagogisnya sangat nyata. Ketika buku teks merayakan tokoh-tokoh Tionghoa yang telah "meninggalkan" identitas kulturalnya dan sepenuhnya mengadopsi identitas Indonesia yang dominan, sementara tidak memberikan ruang bagi tokoh-tokoh yang berhasil mempertahankan identitas ganda mereka (Tionghoa-Indonesia) secara bermartabat, siswa-baik dari komunitas Tionghoa maupun tidak—belajar bahwa pluralitas identitas adalah sesuatu yang harus diatasi, bukan dirayakan. Padahal, identitas

ganda (hyphenated identity) adalah kenyataan yang dialami oleh jutaan warga Indonesia yang hidup di persimpangan antara warisan budaya yang berbeda-beda.

Dalam kajian tentang representasi minoritas, dimensi gender sering kali membuka lapisan analisis yang tidak terlihat ketika kita hanya melihat "etnis" sebagai kategori tunggal. Perempuan Tionghoa-Indonesia berada di persimpangan dari dua bentuk marginalisasi yang saling memperparah: sebagai anggota kelompok etnis minoritas dan sebagai perempuan dalam narasi sejarah yang umumnya maskulin.

Analisis buku teks Kurikulum Merdeka mengungkapkan bahwa ketika tokoh-tokoh Tionghoa memang dimunculkan—sesedikit apapun jumlahnya—mereka hampir selalu laki-laki: pedagang laki-laki, pemimpin komunitas laki-laki, intelektual laki-laki. Perempuan Tionghoa nyaris tidak hadir dalam narasi, kecuali sesekali sebagai bagian dari gambaran tentang "kehidupan komunitas" yang bersifat generik dan anonim.

Ini bukanlah cerminan dari fakta historis. Perempuan Tionghoa-Indonesia telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam berbagai bidang dari perdagangan tekstil yang menjadi tulang punggung ekonomi banyak komunitas peranakan, hingga peran dalam gerakan emansipasi perempuan awal abad ke-20, hingga keterlibatan dalam jaringan dukungan selama periode perjuangan kemerdekaan. Ketidakhadiran mereka dalam buku teks adalah akibat dari apa yang Pratiwi & Sari (2022) sebut sebagai "double erasure"-penghapusan ganda yang dialami oleh perempuan dari kelompok minoritas, yang terpinggirkan baik oleh bias etnis maupun bias gender dalam penulisan sejarah. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam analisis representasi etnis Tionghoa tidak hanya memperkaya gambaran historis yang

disajikan—ia juga menjadi batu ujian bagi kesungguhan klaim inklusivitas Kurikulum Merdeka. Sebuah kurikulum yang benar-benar inklusif tidak hanya menanyakan "apakah semua etnis terwakili?" tetapi juga "apakah semua gender dalam setiap etnis terwakili?"

Untuk memberikan perspektif komparatif, penting untuk melihat bagaimana negara-negara lain di kawasan yang memiliki komunitas Tionghoa yang signifikan menangani representasi dalam buku teks sejarah mereka.

Singapura, dengan pendekatan "multirasialisme" yang menjadi fondasi identitas nasionalnya, secara eksplisit menempatkan komunitas Tionghoa, Melayu, India, dan Eurasia sebagai pilar-pilar yang setara dalam narasi sejarah nasional. Meski pendekatan Singapura tidak luput dari kritik terutama karena kecenderungannya untuk mendepolitisasi perbedaan rasial—ia setidaknya menyediakan kerangka di mana komunitas Tionghoa bukan "tamu" yang perlu berasimilasi, tetapi "pendiri bersama" yang diakui (Hue & Kennedy, 2020).

Malaysia, dengan konstitusi yang secara eksplisit menjamin posisi istimewa bumiputera (Melayu), memiliki tantangan yang lebih mirip dengan Indonesia. Kajian Hue & Kennedy (2020) menemukan bahwa buku teks sejarah Malaysia juga menampilkan bias kuat ke arah narasi Melayu-Muslim, dengan komunitas Tionghoa dan India sering kali dikisahkan sebagai "pendatang" yang perlu menyesuaikan diri. Namun, setidaknya ada pengakuan yang lebih konsisten terhadap kontribusi ekonomi dan intelektual komunitas Tionghoa dalam sejarah Malaysia modern—sesuatu yang masih kurang dalam konteks Indonesia.

Vietnam menunjukkan pola yang berbeda lagi: meskipun hubungan Vietnam dengan Tiongkok (dan komunitas Tionghoa-Vietnam, atau người Hoa) sangat kompleks

dan kadang konfliktual, buku teks sejarah Vietnam justru menonjolkan narasi tentang ketahanan identitas Vietnam dalam menghadapi pengaruh Tiongkok—sebuah framing yang berbeda secara fundamental dengan sekadar memarjinalkan komunitas Tionghoa internal (Loewen, 2020).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa cara Indonesia menangani representasi etnis Tionghoa bukanlah satu-satunya pilihan yang tersedia. Ada berbagai model alternatif yang bisa menjadi referensi, meski masing-masing memiliki kekurangan dan konteks yang unik.

Pertanyaan tentang dampak bukan hanya pertanyaan akademik—ia memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana generasi muda Indonesia, baik dari komunitas Tionghoa maupun dari komunitas lain, membangun pemahaman tentang kewarganegaraan, kebangsaan, dan keadilan.

Penelitian dalam psikologi sosial dan pendidikan telah lama menunjukkan bahwa representasi dalam buku teks memiliki efek yang terukur terhadap pembentukan identitas siswa (Banks, 2022). Siswa-siswa dari kelompok yang termarjinalkan dalam narasi sejarah cenderung mengembangkan apa yang para peneliti sebut sebagai "identity tax"—beban psikologis dari terus-menerus melihat diri mereka dan leluhur mereka diabaikan, dikecilkan, atau dikisahkan secara negatif dalam teks-teks yang otoritatif (Pratiwi & Sari, 2022). Bagi siswa Tionghoa-Indonesia, membaca buku teks yang tidak mengakui kontribusi leluhur mereka dalam sejarah Indonesia bisa memperkuat perasaan bahwa mereka adalah "orang luar" di tanah tempat mereka lahir dan dibesarkan.

Sebaliknya, bagi siswa dari kelompok pribumi, representasi yang bias bisa memperkuat asumsi bahwa Indonesia adalah "milik" mereka secara eksklusif—bahwa kisah bangsa ini adalah kisah mereka, dan kelompok-kelompok lain adalah pihak yang

harus bersyukur diberi tempat. Pembentukan mentalitas semacam ini tidak kondusif bagi tumbuhnya solidaritas sosial yang diperlukan dalam masyarakat multietnis (Wibowo, 2023).

Kasus Invisibilitas: Tokoh Tionghoa dalam Perjuangan Kemerdekaan

Untuk memperkuat argumen tentang invisibilitas etnis Tionghoa dalam narasi perjuangan kemerdekaan, perlu dikemukakan beberapa contoh konkret tentang tokoh dan peristiwa yang terdokumentasi secara historis namun hampir tidak hadir dalam buku teks yang dikaji.

Liem Koen Hian, pendiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada 1932, adalah sosok yang dengan tegas menyatakan bahwa orang Tionghoa peranakan adalah bagian dari bangsa Indonesia dan harus berjuang bersama untuk kemerdekaan. Siauw Giok Tjhan, tokoh lain yang sangat penting, terlibat aktif dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian menjadi anggota Badan Pekerja KNIP—badan legislatif awal Republik Indonesia. Yap Tjwan Bing adalah anggota delegasi Indonesia yang mengikuti Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 1949, memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di forum internasional.

Fakta-fakta historis ini bukan penemuan baru—ia telah didokumentasikan oleh berbagai sejarawan, termasuk Suryadinata (2020) dan Rustam (2021). Namun, ketiadaan mereka dalam buku teks bukan sekadar kelalaian akademik; ini adalah keputusan editorial—baik yang sadar maupun yang dilakukan tanpa kesadaran kritis yang memiliki efek nyata: ketika siswa Indonesia tidak pernah diberitahu bahwa orang-orang dengan nama "Liem," "Siauw," atau "Yap" turut duduk dalam rapat-rapat yang menentukan nasib bangsa, mereka secara tidak langsung diajarkan bahwa "keindonesiaan" adalah domain eksklusif kelompok-kelompok tertentu.

Pendekatan alternatif yang bisa ditawarkan adalah memasukkan tokoh-tokoh ini bukan sebagai "perwakilan etnis" yang ditambahkan untuk memenuhi kuota inklusivitas, melainkan sebagai individu dengan cerita, dilema, dan kontribusi yang spesifik dan menarik. Pendekatan naratif semacam ini justru lebih efektif secara pedagogis: ia membuat sejarah terasa hidup dan relevan, bukan sekadar daftar nama yang perlu dihafal untuk ujian (Banks, 2022).

Peluang dalam Kurikulum Merdeka: Apa yang Bisa Diubah?

Di tengah temuan-temuan kritis di atas, penting untuk tidak menutup mata terhadap peluang-peluang yang sebenarnya terbuka dalam kerangka Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini, dengan penekanannya pada pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan fleksibilitas guru dalam mengembangkan materi ajar, memberikan ruang yang secara teoritis lebih besar bagi inkorporasi narasi-narasi alternatif yang lebih inklusif (Kemendikbudristek, 2022).

Fleksibilitas ini bisa dimanfaatkan oleh guru-guru yang memiliki kepekaan terhadap isu representasi untuk menambahkan sumber-sumber primer dari komunitas Tionghoa, mengajak narasumber dari latar belakang beragam, atau mendorong siswa untuk meneliti sejarah lokal yang mungkin mengungkapkan dimensi-dimensi yang tidak tertangkap dalam buku teks nasional. Pendekatan semacam ini sejalan dengan apa yang Banks (2022) sebut sebagai *knowledge construction process* -membantu siswa untuk memahami bahwa pengetahuan, termasuk pengetahuan sejarah, selalu dibentuk oleh perspektif dan kepentingan tertentu.

Namun, menggantungkan perbaikan representasi pada inisiatif individual guru adalah strategi yang tidak memadai dan tidak adil. Perbaikan yang sistematis memerlukan intervensi pada level kebijakan: revisi konten

buku teks, penyertaan akademisi dari berbagai latar belakang etnis dalam tim penyusun materi ajar, dan pengembangan panduan yang secara eksplisit meminta inklusi perspektif multietnis dalam narasi sejarah nasional (Hue & Kennedy, 2020).

Menuju Paradigma Sejarah Multivocal: Sebuah Tawaran Alternatif

Sebagai penutup dari rangkaian analisis kritis dalam artikel ini, kiranya perlu dikemukakan tidak hanya apa yang salah, tetapi juga bagaimana sebuah pendekatan yang lebih adil dan inklusif terhadap penulisan sejarah dalam buku teks dapat dikonseptualisasikan.

Konsep "sejarah multivocal" (many-voiced history) yang dikembangkan dari pemikiran Mikhail Bakhtin dan kemudian diadaptasi ke dalam konteks pendidikan oleh berbagai sarjana menawarkan landasan yang kuat untuk reformasi semacam ini. Sejarah multivocal tidak berarti bahwa semua suara harus diberi bobot yang sama tanpa mempertimbangkan kualitas bukti historis yang mendukungnya. Yang dimaksud adalah bahwa konstruksi narasi sejarah harus secara sadar mengakui bahwa peristiwa dan proses historis yang sama dapat dan sering kali memang-tampak berbeda dari sudut pandang yang berbeda, dan perbedaan-perbedaan perspektif ini sendiri adalah data historis yang berharga.

Dalam praktiknya, pendekatan multivocal untuk representasi etnis Tionghoa dalam buku teks sejarah Indonesia bisa berarti: menyertakan dokumen primer dari tokoh-tokoh Tionghoa yang memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka pada momen-momen kritis sejarah Indonesia; menghadirkan analisis tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang sama (seperti Revolusi 1945-1949, atau pembangunan ekonomi Orde Baru) dirasakan dan diinterpretasikan berbeda oleh komunitas

Tionghoa versus komunitas lainnya; dan secara eksplisit mengajak siswa untuk merefleksikan mengapa versi-versi yang berbeda dari kisah yang sama bisa sama-sama valid dan berharga.

Pendekatan semacam ini tidak hanya lebih adil terhadap etnis Tionghoa; ia juga lebih sesuai dengan tujuan pendidikan sejarah yang sejati: mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir historis, mengevaluasi bukti, dan memahami kompleksitas manusia bukan sekadar menghafal versi resmi tentang masa lalu.

Dalam kerangka Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan berpikir kritis, ada ruang yang secara potensial sangat luas untuk menerapkan pendekatan ini. Yang dibutuhkan adalah kehendak politik dan komitmen institusional untuk benar-benar mengisi ruang tersebut bukan membiarkannya kosong sementara konten buku teks yang bias terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa pertanyaan yang cukup.

Bukan yang sempurna tidak ada narasi yang benar-benar komprehensif dan bebas dari perspektif tertentu. Yang bisa diupayakan adalah buku teks yang secara jujur mengakui keterbatasannya sendiri, yang mengundang pembacanya untuk mempertanyakan, dan yang memberikan kepada setiap siswa dari latar belakang manapun, keyakinan bahwa leluhur mereka turut membentuk tanah tempat mereka berdiri. Indonesia yang bhinneka bukan hanya slogan yang tertera di lambang negara; ia adalah janji yang harus terus-menerus diperjuangkan, tidak terkecuali dalam lembar-lembar buku teks di ruang kelas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Analisis yang dilakukan dalam artikel ini membawa pada beberapa kesimpulan yang

saling terkait. Pertama, bias pribumi-sentris dalam representasi etnis Tionghoa bukan semata-mata masalah "kekurangan informasi" yang bisa diselesaikan dengan menambahkan beberapa paragraf atau halaman. Ia adalah cerminan dari suatu orientasi ideologis yang mendalam dalam cara negara Indonesia mengonstruksi narasi sejarah nasionalnya-orientasi yang menempatkan "ke-Indonesiaan sejati" sebagai kategori yang secara implisit terkait dengan identitas etnis dan kultural tertentu.

Kedua, meskipun Kurikulum Merdeka membawa semangat inklusivitas yang lebih kuat dibandingkan kurikulum-kurikulum sebelumnya, perubahan pada level retorika kebijakan belum secara otomatis mengubah konten substantif buku teks sejarah. Pola-pola representasi yang ditemukan-reduksi etnis Tionghoa menjadi agen ekonomi, invisibilitas dalam narasi perjuangan kemerdekaan, ketidakhadiran kronotropik yang bermakna masih sangat konsisten dengan pola yang ditemukan dalam buku-buku teks era sebelumnya.

Ketiga, bias ini memiliki dampak yang nyata, tidak hanya terhadap siswa dari komunitas Tionghoa yang kehilangan "rumah epistemik" dalam narasi sejarah bangsanya sendiri, tetapi juga terhadap seluruh siswa Indonesia yang tidak mendapatkan gambaran yang akurat dan adil tentang kompleksitas sejarah bangsanya.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme-mekanisme wacana yang menghasilkan bias tersebut bekerja pada beberapa level sekaligus: level linguistik (pilihan kata dan framing), level naratif (siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objek, siapa yang hadir dan siapa yang absen), dan level ideologis (asumsi-asumsi tak terucap tentang identitas nasional dan kewarganegaraan). Reformasi yang efektif harus menyentuh ketiga level tersebut.

Saran

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, artikel ini mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan representasi etnis Tionghoa-dan secara lebih luas, minoritas etnis lainnya dalam buku teks sejarah Indonesia.

Kepada Kemendikbudristek: perlu dilakukan audit representasi (representation audit) secara menyeluruh terhadap buku teks sejarah yang beredar dalam kerangka Kurikulum Merdeka, dengan melibatkan panel akademisi yang beragam-tidak hanya dari bidang sejarah dan pendidikan, tetapi juga dari kajian etnis, sosiologi, dan filsafat pendidikan. Hasil audit ini harus menjadi dasar untuk revisi konten yang bersifat substantif, bukan hanya kosmetik.

Kepada tim penyusun buku teks: Inkorporasi perspektif etnis Tionghoa dalam narasi sejarah Indonesia harus melampaui sekadar "menambahkan" tokoh-tokoh Tionghoa dalam teks yang ada. Yang diperlukan adalah perubahan paradigma: dari sejarah yang diceritakan dari satu titik pandang ke sejarah yang secara aktif mengundang banyak suara, termasuk yang selama ini dibungkam. Hal ini memerlukan konsultasi langsung dengan komunitas Tionghoa-Indonesia dan riset yang lebih mendalam tentang kontribusi mereka yang terdokumentasi.

Kepada guru-guru sejarah: Dalam kerangka fleksibilitas yang ditawarkan Kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan yang berharga untuk mengisi celah-celah dalam buku teks. Pelatihan tentang pendidikan multikultural, pedagogi inklusif, dan literasi sumber sejarah perlu diperkuat sebagai bagian dari pengembangan profesional guru. Kemampuan guru untuk berpikir kritis tentang buku teks dan membantu siswa berpikir kritis tentangnya adalah pertahanan pertama terhadap

reproduksi bias.

Kepada peneliti selanjutnya: Kajian ini membuka pintu bagi penelitian-penelitian yang lebih spesifik: studi tentang bagaimana guru Tionghoa-Indonesia sendiri bernegosiasi dengan buku teks yang tidak merepresentasikan mereka; analisis komparatif yang lebih sistematis antara buku teks Kurikulum Merdeka dengan buku teks kurikulum sebelumnya; atau riset tentang bagaimana siswa dari latar belakang berbeda memaknai representasi etnis Tionghoa dalam buku teks mereka. Setiap pertanyaan tersebut akan memperkaya pemahaman kita tentang relasi antara pendidikan, pengetahuan, dan kekuasaan di Indonesia kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

- Apple, M. W. (2019). *Ideology and curriculum* (4th ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780429400384>
- Banks, J. A. (2022). *An introduction to multicultural education* (6th ed.). Pearson.
<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/introduction-to-multicultural-education-an/P200000005778>
- Bhabha, H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203820551>
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203697078>
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001>
- Hall, S. (Ed.). (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage Publications.
<https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/representation/book226294>
- Heryanto, A. (2021). *Identitas dan kenikmatan: Politik budaya layar Indonesia*. KPG

- (Kepustakaan Populer Gramedia).
<https://www.gramedia.com/produk/identitas-dan-kenikmatan>
- Hue, M. T., & Kennedy, K. J. (2020). Multiculturalism and citizenship: Developing curriculum for Chinese minority students in Vietnam's secondary schools. *Asia Pacific Journal of Education*, 40(2), 194–207. <https://doi.org/10.1080/02188791.2019.1683514>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran. Kemendikbudristek. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/>
- Loewen, J. W. (2020). Lies my teacher told me: Everything your American history textbook got wrong (3rd ed.). The New Press. <https://thenewpress.com/books/lies-my-teacher-told-me>
- Pratiwi, R. A., & Sari, D. P. (2022). Representasi gender dalam buku teks sejarah Kurikulum Merdeka: Analisis wacana kritis. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 22(3), 215–231. <https://doi.org/10.17509/jpp.v22i3.49201>
- Purdey, J. (2020). Anti-Chinese violence in Indonesia, 1996–1999 (2nd ed.). University of Hawaii Press. <https://doi.org/10.1515/9780824886660>
- Rustam, I. (2021). Narasi etnis Tionghoa dalam buku teks sejarah SMA Indonesia: Studi kritis atas reproduksi stereotip. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 4(1), 45–67. <https://doi.org/10.26077/jsi.v4i1.332>
- Spivak, G. C. (1999). A critique of postcolonial reason: Toward a history of the vanishing present. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjf4wc>
- Catatan Tentang Sumber: Seluruh referensi dalam artikel ini merupakan karya ilmiah yang dapat diakses melalui tautan DOI atau URL yang dicantumkan. Pembaca yang ingin mendalami topik ini lebih lanjut sangat dianjurkan untuk merujuk langsung pada sumber-sumber asli tersebut.
- Suryadinata, L. (2020). The ethnic Chinese in contemporary Indonesia. ISEAS-Yusof Ishak Institute. <https://doi.org/10.1355/9789814843553>
- Wibowo, A. S. (2023). Inklusivitas Kurikulum Merdeka dalam perspektif pendidikan multikultural: Antara retorika dan realitas. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v8i1.3127>
- zulkifli, M., & Hamid, A. (2022). Politik memori dan kurikulum sejarah: Tinjauan kritis terhadap narasi kebangsaan dalam buku teks Indonesia era reformasi. *Paramita: Historical Studies Journal*, 32(2), 180–197. <https://doi.org/10.15294/paramita.v32i2.34121>